KOLOM SI KLERK

PERLOMBAAN MENGEJAR PAD

Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang Otonomi Daerah (Otda) ternyata telah melahirkan banyak kelemahan terutama kulaitas kepemimpinan daerah yang dinilai lebih buruk daripada waktu orde baru. Tidak hanya pada tingkat birokrasi pemerintah tetapi juga anggota DPRD-nya. Hasil evaluasi yang dilakukan di beberapa daerah melahirkan catatan negatif tentang otda. Catatan tersebut berupa pertama meningkatnya tindak korupsi baik di tingkat eksekutif maupun di tingkat legislatif serta yudikatif. Kedua tingkat koordinasi juga dinilai lemah pada level Propinsi, pusat dan kabupaten/kota. Ketiga tingkat sentralisasi partai politik yang sampai sekarang terus berjalan yang memperlemah demokrasi tingkat local, dan keempat pengelolaan keuangan masih pemerintah sentris bukan masyarakat sentris. Kelima struktur pemerintahan yang dinilai terlalu gemuk dan berlemak sehingga dianggap tidak efektif dan efisien, keenam pelayanan kepada masyarakat juga tidak semakin baik. Dan ketujuh hampir sebagian besar tata tertib DPRD mengkerdulkan demokrasi pada tingkat lokal (Suara Karya, 14 Agustus 2003).

Berbicara masalah buruknya pelayanan yang diberikan pada masyarakat ini dipicu karena karena kewenangan daerah yang diberikan pemerintah pusat dianggap sebagai kewenangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka mengejar PAD tersebut pemerintah daerah juga telah banyak mengeluarkan beberapa peraturan daerah (perda). Perda-perda tersebut ternyata di lapangan banyak yang dianggap cacat. Begitu banyaknya pungutan yang dilakukan penda menyebabkan juga terganggunya iklim investasi. Menurut catatan Depdagri, terdapat paling tidak 7000 perda yang dianggap tidak layak. Perda-perda tersebut dianggap tidak layak karena bertentangan dengan perundang-undangan yang ada, menimbulkan tumpang tindih dan kerancuan.

Pemberlakuan UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, tak pelak lagi dituding sebagai pemicu daerah melakukan berbagai jenis pemungutan bagi kekuatan basis keuangan mereka. Walaupun tujuan awal dari desentralisasi ini sendiri adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat supaya lebih cepat, efektif dan efisien. Selanjutnya tujuan akhir yang ingin dicapai adalah percepatan pertumbuhan ekonomi dan diharapkan kesejahteraan masyarakat di daerah akan juga meningkat.

Konsekuensi dari pemberlakuan kedua UU tersebut memang membuat setiap daerah seakan berlomba untuk mengejar PAD sebanyak banyaknya, agar mereka tidak terlalu tergantung terhadap DAU dan DAK yang hanya dapat dipakai untuk pengeluaran rutin. Dana pembangunan darimana? Ya, harus dicari dari PAD. Maka kejarlah PAD selagi bisa dilakukan. (Dayat Hidayat).